BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung terdiri atas 45 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 426 desa yang pusat pemerintahannya di Kecamatan Soreang. Kabupaten Bandung terletak antara 6º41 - 7º19 lintang selatan dan 107º22 - 108º5 bujur timur, pada ketinggian antara 110 m 2.249 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Bandung 309.207,93 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan. Adapun dengan batas-batas administratif Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garutdan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Bandung meski sudah berusia cukup tua ternyata belum menjadi jaminan untuk mulai menuju masyarakat yang repeh rapih kertaraharja. Arus deras otonomi daerah Kabupaten Bandung harus mulai dari titik baru lagi kalau tidak mau disebut dari nol. Daerah cekungan seluas 309.207,93 hektar telah

menjadi daerah percontohan pelaksanaan otonomi daerah sejak beberapa tahun lalu namun keluarnya UU No.22/1999 diakui memiliki konsekuensi yang cukup berat. Otonomi daerah merupakan barang baru sehingga semua Dati II di Indonesia termasuk Kabupaten Bandung masih dalam proses transisi. Proses transisi itu sejumlah peraturan daerah sebagai penjabaran semangat otonomi daerah harus segera diwujudkan pihak eksekutif dan legislatif.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah ± 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif.

3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi dari Pemerintahan Kabupaten Bandung, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, cultural dan

berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Visi yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik
2 Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan dinamis
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa
6. Menggali dan menumbuh kembangkan budaya sunda
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa

Misi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya, dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi dan misi Kabupaten Bandung tersebut dapat tercapai apabila adanya pemahaman dari berbagai unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
3. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

3.1.3 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas, dipandang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Cangkuang berdiri pada 22 Oktober 2003 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Banjaran, berikut pengisian jabatan strukturalnya dan efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Namun demikian dalam prakteknya masih memerlukan waktu yang cukup untuk dapat melaksanakan fungsinya. Hal tersebut dapat dimaklumi sehubungan dukungan sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Sejak dikeluarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun

2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan mengalami perubahan yang mendasar.

Implikasi adanya perubahan ini kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas dengan mengacu kepada Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat tersebut. Perubahan ini sesuai dengan tuntutan masyakarat yang menginginkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang efesien dan efektif dengan pendekatan publik service yang sesuai dengan standar pelayanan.

Kecamatan Cangkuang yang mempunyai luas wilayah 2.396,222 Ha merupakan salah satu dari 45 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Terdiri dari 7 Desa, 28 Dusun, 78 RW dan 326 RT. Memiliki penduduk sebanyak 62.726 jiwa perKepala Keluarga yang terdiri dari 32**.**245 laki-laki dan perempuan 30.507 orang. Kecamatan Cangkuang terletak pada ketinggian 653 meter di atas permukaan laut. Suhu maksimum 35° celcius dan suhu minimum 20° celcius, bertopografi datar sampai berbukit dan curah hujan rata-rata berkisar 260 mm/tahun.

Wilayah kecamatan Cangkuang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, seperti:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pameungpeuk.
2. SebelahTimur : Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Cimaung.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Pasirjambu
4. Sebelah Barat : Kecamatan Soreang dan Kecamatan Katapang.

Kecamatan cangkuang juga terdiri dari 7 Desa, yaitu:

1. Desa Cangkuang
2. Desa Ciluncat
3. Desa Tanjungsari
4. Desa Bandasari
5. Desa Jatisari
6. Desa Nagrak
7. Desa Pananjung

3.1.3.1 Jumlah Kependudukan Kecamatan Cangkuang

Dilihat dari data jumlah dari data penduduk bulan Juni 2012 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung berjumlah 62.726 jiwa terdiri dari penduduk Laki-laki 32.245 jiwa, dan jumlah perempuan 30.507 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 15.321 KK. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk bulan Juni 2012

NO	Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Bandasari	4.210	3.921	8.131
2	Cangkuang	2.408	4.029	8.337
3	Ciluncat	5.585	5.348	10.933
4	Jatisari	3.388	3.139	6.527
5	Nagrak	6.390	6.203	12.593
6	Panajung	4.223	3.956	8.179
7	Tanjung Sari	4.141	3.911	8.052
Total		**32.245**	**30.507**	**62.726**

Sumber: UPT PPKB Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Juni 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas jumlah laki-laki yang ada di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung cukup banyak di bandingkan jumlah perempuan. Melihat jumlah laki-laki yang lebih banyak dari pada perempuan bahwa jumlah penduduk tersebut belum merata dilihat dari jumlah berdasarkan jenis kelaminnya, dan bila tingkat jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan seharusnya peranserta dalam program KB pun harus lebih banyak dari pada perempuan yang ada.

3.1.3.2 Keadaan PUS menurut Umur

Dilihat dari data jumlah dari data penduduk bulan Juni 2012 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung berjumlah 62.726 jiwa terdiri dari penduduk Laki-laki 32.245 jiwa, dan jumlah perempuan 30.507 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 15.321 KK. Kategori penduduk bibagi dalam tingkat usia, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keadaan Menurut PUS Menurut Umur, Tahun 2012

NO	Desa/ kelurahan	<20 Tahun	20-29 Tahun	30-49 Tahun	Jumlah
1	Bandasari	83	514	1.066	1663
2	Cangkuang	16	395	1.021	1432
3	Ciluncat	34	448	1.509	1991
4	Jatisari	48	419	798	1256
5	Nagrak	28	594	1.953	2575
6	Panajung	21	314	1.042	1377
7	Tanjung Sari	55	438	1.039	1532
Total					**11.826**

Sumber: UPT PPKB Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Juni 2012

Berdasarkan tabel jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur, desa nagrak yang mempunyai jumlah paling banyak dengan angka 2.575 /keluarga di antara desa-desa yang lainnya. Hal tersebut terlihat belum meratanya jumlah PUS yang ada di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3.1.3.3 Jumlah Kepala Penduduk Menurut Status Pendidikan

Data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan akan memberikan gambaran tentang potensi sumber daya manusia dari aspek kualitas pendidikan di Kecamatan Cangkuang. Dari data yang ada menunjukan bahwa, kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang, sehingga terdapat keseimbangn dengan Kecamatan yang lain.

Adapun data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Kepala Penduduk Menurut Status Pendidikan

NO	Desa/ kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD-SLTP	Tamat SLTA	Tamat Ak/PT	Jumlah
1	Bandasari	216	1.465	540	140	2.361
2	Cangkuang	3	1.612	693	92	2.400
3	Ciluncat	27	1.604	1.070	308	3.009
4	Jatisari	77	1.574	248	26	1.925
5	Nagrak	69	1.527	1.312	444	3.397
6	Panajung	78	1.436	635	110	2.259
7	Tanjung Sari	9	1.467	653	100	2.229
						15.321
Jumlah Tamat Pendidikan		479	10.685	5.151	1.220	**17.056 +**
						=
Total						**32.377**

Sumber: UPT PPKB Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Juni 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah kepala keluarga berdasarkan status pendidikan. Tingkat jumlah yang paling tinggi terlihat dari tamat SD-SLTP dengan jumlah 10.685, faktor tersebut bisa mempengaruhi tingkat jumlah peranserta KB masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang. Jumlah total dilihat dari tingkat pendidikan yang terbanyak adalah desa Nagrak dengan angka 3.397 /kepala keluarga.

3.1.3.4 Peserta KB dan yang bukan Peserta KB di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bamdung

Data penduduk Kecamatan Cangkuang di atas meberikan gambaran tentang pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, dari data yang akan di jelaskan dari peran serta masyarakat yang

menjadi peserta ataupun bukan peserta KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Berikut akan disampaikan dalam bentuk Tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Jumlah Peserta KB dan Bukan Peserta KB, Tahun 2012

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Jumlah Peserta KB	Jumlah Bukan Peserta KB	Jumlah
1	Bandasari	8.131	1.455	362	9.948
2	Cangkuang	8.337	1.328	208	9.873
3	Ciluncat	10.933	1.762	272	12.967
4	Jatisari	6.527	1.093	589	8.209
5	Nagrak	12.593	1.680	685	14.958
6	Panajung	8.179	1.193	245	9.617
7	TanjungSari	8.052	1.280	328	9.570
					75.142
Jumlah Peserta dan Bukan Peserta KB		**62.752**	**9.791**	**2.689**	**75.232** +
Total					**150.347**

Sumber: UPT PPKB Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Juni 2012

Berdasarkan jumlah keluarga yang ada di Kecamatan Cangkuang dengan jumlah 62.752/jiwa bahwa Kecamatan mempunyai penduduk yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peserta KB cukup banyak di bandingkan dengan yang bukan peserta KB yang ada di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3.1.3.5 Jumlah Peserta KB melalui Metoda Kontrasepsi

Untuk memperlancar proses pelaksanaan KB di wilayah Kecamatan Cangkuang, dibawah terdapat tabel jumlah dari peserta KB melalu Metoda Kontrasepsi. Data tersebut akan memperjelas terhadap Efektivitas BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung. Berikut tabel dari jumlah peserta KB melalui Metoda Kontrasepsi sebagai berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Peserta KB Melalui Metoda Kontrasepsi

No	Desa/ kelurahan	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	JUM
1	Bandasari	270	76	11	19	33	1.201	242	1.852
2	Cangkuang	242	85	20	3	21	859	146	1.376
3	Ciluncat	233	85	22	23	43	1.038	397	1.841
4	Jatisari	71	46	16	6	63	726	222	1.150
5	Nagrak	124	37	61	6	154	857	209	1.448
6	Panajung	156	21	21	5	149	721	200	1.264
7	Tanjung Sari	107	28	6	10	26	1.010	110	1.297
Jumlah									**10.228**

Sumber: UPT PPKB Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Juni 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang mengikuti program KB berdasarkan alat kontrasepsi sudah cukup banyak, hal tersebut bisa dilihat dari jumlah peran sertanya sebesar 10.228 /jiwa. Dengan demikian program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung bisa berjalan lebih efektif bila setiap tahunnya bisa lebih banyak lagi yang mengikuti program KB tersebut.

3.1.4 Gambaran Umum BKBPP Kabupaten Bandung

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok yang dilaksanakan adalah pengendalian jumlah

penduduk melalui pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh BKBPP Kabupaten Bandung adalah mengingatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu:

1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 point
2. Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan Total Fertility Rate (TFR)= 2,10 penduduk tumbuh seimbang.

Pelayanan satuan kerja perangkat daerah BKBPP Kabupaten Bandung sebabai pendukung dari Visi dan Misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2015 yaitu Visi:" Terwujudnya Kabupaten Badung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalu tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religious, kultural dan berwawasan lingkungan. "Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya profesionalisme Birokrasi
2. Meningkatkan SDM, memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa
3. Memantapkan pemulihan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
4. Menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan buda sunda serta kearifan lokal lainya
5. Memantapkan pembangunan pedesaaan

6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Berdasarkan Visi dan MIsi tersebut, maka BKBPP Kabupaten Bandung merupakan SKPD penunjang dalam mencapai misi kedua yaitu ”meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dan prioritas ketiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan. Dengan demikian sebagai implementasi untuk mendukung tujuan tersebut maka pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia di bidang kesehatan melalui pembangunan Keluarga Berencana dam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung.

BKBPP Kabupaten Bandung, memerlukan intergrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten ataupun Nasional. Tujuan *Milinium Developen Goals* (MDGS) adalah upaya penyelematan bangsa *(save nations).* Namun, itu dapat menimbulkan dampak, yakni meningkatkan pertumbuhan penduduk. Ini terjadi karena tujuan-tujan (*goals*) yang tercantum dalam MDGS hanya menitikberatkan pada upaya kelangsungan hidup, tanpa diikuti pengendalian penduduk. Demi tercapainya MDGS maka sepatutnya dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program KB.

BKBPP Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system manajemen pemerintahan lima tahun kedepan, melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

Tujuan program KB secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian diimpementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program KB untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang apabila dicapai.

3.1.4.1 Tugas Pokok BKBPP Kabupaten Bandung

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Teknis daerah Kabupaten Bandung. Tugas Pokok yang dilaksanakan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh BKBPP Kabupaten Bandung adalah meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan upaya yaitu:

Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas Pokok dan Fungsi, menyangkut tugas aparatur yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekertariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

2) Sekertariat Membawahkan:

a. Bagian Penyusuna Program

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

b. Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtangaan serta administrasi kepegawaian.

c. Bagian Keuangan.

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

3) Bidang Informasi dan data Keluarga

Tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan data dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga yang meliputi

pengelolaan data mikro keluarga serta analisa, evaluasi dan pelaporan. Bidang informasi dan Data Keluarga membawahi:

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan mikro keluarga.

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas analisa, evaluasi, dan pelaporan.

4) Bidang Keluarga Berencana

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayan keluarga berencana meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian reproduksi remaja.

5) UPT Pengendalian Program KB

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagai fungsi badan dibidang pelayanan, pengelolaan, dan pengendalian program KB.

Berdasarkan urutan tugas pokok dan fungsi BKBPP di atas berikut adalah daftar pegawai yang bersangkutan dengan program KB atau daftar pegawai BKBPP Kabupaten Bandung:

Tabel 3.6
Data Pegawai BKBP Kabupaten Bandung

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Edi Siswandi	Kepala BKBPP	S1
2	Drs. Ruki Rukhiat	Kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga	S1

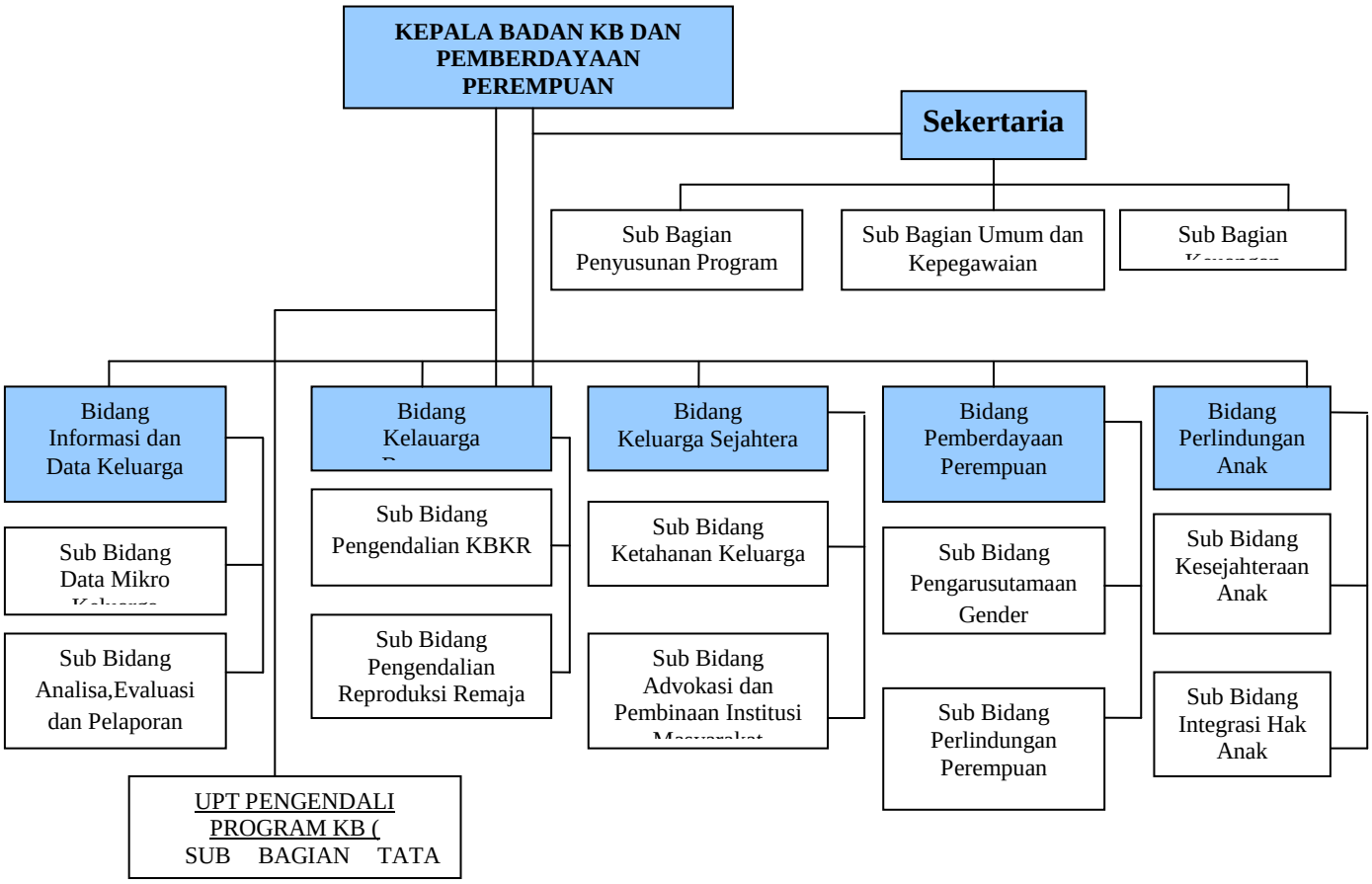
3	Ir.Hj.Henny Herliani	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	S1
4	Drs. Rukmana, M.Si	Sekretaris Badan	S2
5	Dra.Hj.Merry Indrawati	Kepala Bidang Perlindungan Anak	S1
6	Muhammad Hairun, SH	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	S1
7	Hj. Nelly Herliani, SH	Ka.Subid Perlindungan Hal Anak	S1
8	Drs. Ade Suparman	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
9	Hj. Enas Suhaerah, SH	Ka.Subid Perlindungan Perempuan	S1
10	Drs. Rochman	Ka.Subid Data Mikro Keluarga	S1
11	Dra. Suryati Anna Turnip	Ka.Subid Perlindungan Anak	S1
12	Rika Sunjana, S.Sos	Ka.Subid Advokasi dan Pemb. Ins.Masyarakat	S1
13	Nunung Nuraini R, S.Pd	Ka Subid Pengarusutamaan Gender	S1
14	Endi Supriyadi, A.Md	Ka.Subid Analisa, Evaluasi dan Pelaporan	D3
15	A. Rachmat,. S.Pd	Kepala Bidang Keluarga Berencana	S1
16	Muhamad Wahyudin, SE	Ka.Subid Ketahanan Keluarga	S1
17	Yogaswara, S.Pd	Ka.Subid Pengendalian KB KR	S1
18	Zaenabiah, S.Pd	Ka. UPT Pengend. Prog. KB Kec. Cangkuang	S1
19	Asep Mohamad Ridwan, SE	Ka.Subid Pengendalian KRR	S1
20	Hidayat	Ka.Subag Keuangan	SMA
21	Aten Sonadi, S.Sos, M.Si	Ka.Subag Penyusunan Program	S2
22	Dandan Mardiana, SH	Bendahara	S1

Sumber: BKBPP Kabupaten Bandung Tahun 2010

3.1.4.2 Struktur Organisasi BKBPP Kabupaten Bandung

Struktur birokrasi dalam suatu dinas maupun instansi-instansi pada suatu organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Struktur organisasi BKBPP Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar 3.7 sebagai berikut:

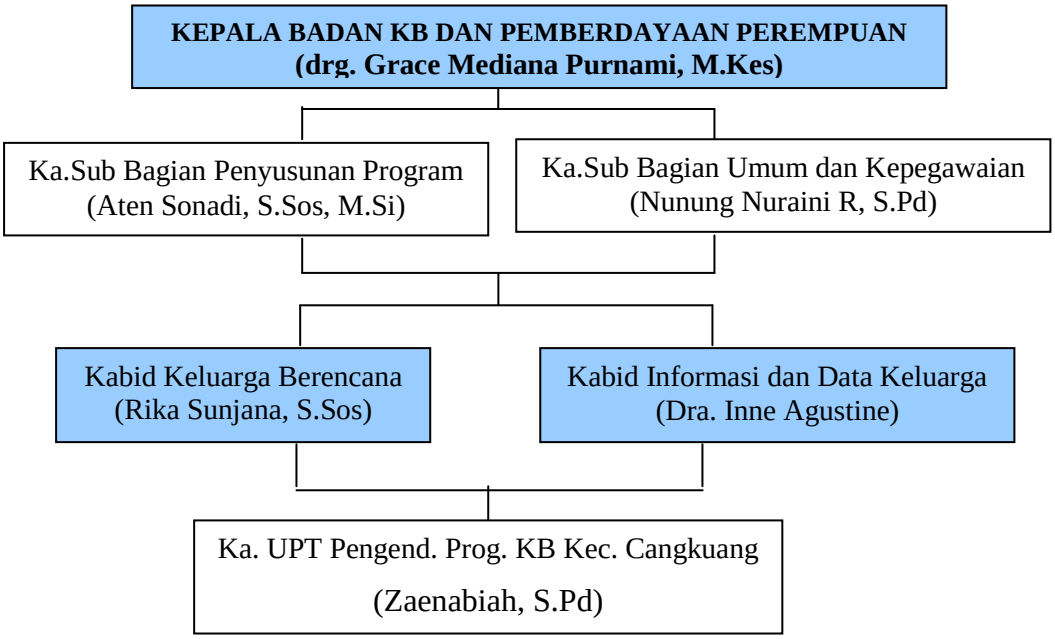
Gambar 3.7
Struktur Organisasi BKBPP Kabupaten Bandung



Sumber: BKBPP Kabupaten Bandung 2012

Struktur organisasi BKBPP Kabupaten Bandung Berdasarkan gambar 3.7 pada merupakan suatu hal yang vital di BKBPP Kabupaten Bandung. Organisasi yang terjalin akan membuahkan proses penyelenggaraan tugas maupun kewajiban aparatur yang maksimal. Berdasarkan penjelasaan stuktur organisasi BKBPP Kabupaten Bandung berikut adalah gambaran Susunan organisasi yang berkaitan langsung pada pelaksanaan program KB dapat dilihat pada gambar 3.8 sebagai berikut:

Gambar 3.8
Struktur Organisasi BKBPP Kabupaten Bandung



Sumber*:* BKBPP Kabupaten Bandung 2012

Gambar di atas menjelaskan susunan organisasi BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB d Wilayah Kecamatan Cangkuang berdasarkan sub bagian, sub bidang, dan UPT PPKB. Struktur organisasi tersebut menjelaskan pelaksana program KB pada BKBPP Kabupaten Bandung khususnya di Wilayah Kecamatan Cangkuang.

3.1.5 Dasar Hukum Program Keluarga Berencana (KB)

Tahun 1970 didirikan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Melalui Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah lembaga Non Departemen yang mempunyai tanggung jawab pada bidang pengendalian penduduk di Indonesia. Atas dasar itulah proyek besar di bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut Program Keluarga Berencana Nasional. Lembaga resmi pelaksana tekhnis programnya bernama BKKBN yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara herarkis ada mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan desa. Program dan kelembagaannya selanjutnya disempurnakan melalui Kepres Nomor 33 tahun 1972, Kepres Nomor 38 tahun 1978, serta Kepres Nomor 109 tahun 1993 tentang Pembentukan Kementerian Kependudukan dan BKKBN.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). Pada pasal 43 Kepres 103 Tahun 2001 tersebut ditetapkan bahwa BKKBN mempunyai peran sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proram KB tentang kedudukan dan fungsi BKKBN Provinsi dan Kab/Kota diatur dalam Kepres Nomor 9 Tahun 2004 pasal 114 ayat (2) bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan

bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi, tetap dilaksanakan oleh pemerintah sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Berdasarkan Rakernas Program KB tahun 2011, yang mengamanatkan perlunya ditingkatkan peran pria/laki-laki dalam Keluarga Berencana, ditindak lanjuti melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tanggal 17 Januari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan di lapangan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN melalui Keputusan nomor: 70/HK- 010/B5/2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Seksi khusus Peningkatan Patisipasi Pria di bawah Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bertugas menyusun paket informasi sesuai kondisi sosial, menyiapkan, dan mengembangkan segmentasi sasaran dalam rangka peningkatan partisipasi KB pria yang pelaksanaanya secara tekhnis di kecamatan dan desa.

KB menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya untuk peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan

bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

3.1.6 Gambaran Umum Program KB di BKBPP Kabupaten Bandung

Program KB dilaksanakan dalam rangka usaha pemerintah untuk membangun manusia yang berkualitas. Pemerintah berkeinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi tertentu ke keadaan lain yang lebih bernilai. Proses perubahan itu dapat menjangkau sasaran-sasaran perubahan keadaan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai pengendali masa depan, di dalam melaksanakan pembangunan itu perlu sekali memperhatikan segi manusianya, karena dalam arti proses, pembangunan itu menyangkut makna bahwa manusia itu obyek pembangunan dan sekaligus subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan manusia harus diperhitungkan, sebab mempunyai nilai dan potensi yang luar biasa.

Pada dasarnya pengelolaan Program KB Nasional adalah suatu proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk pengaturan kelahiran guna membangun keluarga sejahtera. Keterlibatan masyarakat yang semakin meluas dalam pengelolaan Program KB dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sehingga menjadikan Program KB Nasional sebagai salah satu sektor yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional dalam proses pengambilan keputusan.

Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mempunyai peran yang strategis karena harus menyediakan data dan informasi yang benar, mudah dicerna, cepat dan tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Dalam kaitannya dengan program Keluarga Berencana sebagai usaha pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil, dan spirituil sesuai dengan tujuan pokok yang dirumuskan dalam pembahasan dan batang tubuh UUD 45, maka partisipasi aktif warga masyarakat juga akan sangat ditentukan oleh persepsinya terhadap program Keluarga Berencana yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan budayanya yang khusus.

Tahun 1970 didirikan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Melalui Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah lembaga Non Departemen yang mempunyai tanggung jawab pada bidang pengendalian penduduk di Indonesia. Atas dasar itulah proyek besar di bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut Program Keluarga Berencana Nasional. Lembaga resmi pelaksana tekhnis programnya bernama BKKBN yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara herarkis ada mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan desa. Program Keluarga Berencana merupakan upaya dalam mengurangi lonjakan penduduk dan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengendalian jumlah penduduk. KB ini diharapkan dapat mengatasi lonjakan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat pesat, dan memberikan pengertian terhadap masyarakat yang kurang mengerti tentang manfaat Program KB bagi kehidupan mendatang.

Program KB secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, kemudian diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tampa pertumbuhan.

Program Keluarga Berencana merupakan upaya dalam mengurangi lonjakan penduduk dan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengendalian jumlah penduduk. KB ini diharapkan dapat mengatasi lonjakan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat pesat, dan memberikan pengertian terhadap masyarakat yang kurang mengerti tentang manfaat Program KB bagi kehidupan mendatang. Adapun fungsi dari pelaksanaan program KB sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera.
b. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan daerah.
c. Meningkatkan kualitas kepersetaan peserta KB
d. Meningkatkan peran serta swasta/steakholder dalam pembangunan KB

Pelaksanaan program KB merupakan upaya BKBPP dalam mengendalikan jumlah penduduk Kabupaten Bandung agar tingkat kenaikan kelahiran bisa di atasi agar tidak terjadi lonjakan. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan progam KB adalah:

a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksana peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan
b. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera
c. Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak

Tujuan dari pelaksanaan program KB tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi dari BKBPP Kabupaten Bandung. Pelaksanaan program KB tersebut untuk mewujudkan keserasian, keselarasa, dan keseimbangan kebijakan penduduk serta mewujudkan keluarga kecil bahagia, dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Sasaran dalam program KB adalah demi tercapainya pelayanan KB melalui pelayanan KB MOP dan MOW kesepakatan dengan medis pelayanan KB paska pelayanan KB, serta tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa, misalnya seperti:

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun.
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan.
3. Menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi *(unmet need*) menjadi 6 persen.
4. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen.
5. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.
6. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.

7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak.
8. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera-1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
9. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional.

Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan.

Adapun tujuan-tujuan yang dilaksanakan oleh BKBPP Kabupaten bandung dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
c. Kesimpulan dari tujuan program KB adalah: Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi secara dekat dengan aparatur BKBPP Kabupaten Bandung serta masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang pada pelaksanaan program KB. Interaksi tersebut melalui wawancara, observasi nonpartisipan studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program KB.

Penelitian kualitatif ini memberikan penjelasan mengenai tentang apa dan bagaimana, siapa yang terlibat, kapan dan di mana. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai Efektivitas BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang.

3.2.1 Desain Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam skripsi ini adalah berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penelitian dan pengamatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriftif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Pengertian metode penelitian deskriptif menurut S. Nasution dalam bukunya Metode Research mendefinisikan metode penelitian deskriptif, sebagai berikut:

> "Metode penelitian deskriftif adalah metode untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial, yang lebih sepesifik dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukan hubungan antara berbagai variabel" (Nasution, 2001:24).

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif adalah salah satu cara dalam pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan suatu objek yang di selidiki bedasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat saat sekarang. Penulis menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung)

Penulis juga memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti dalam menyusun penelitian secara langsung di lapangan. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*" (Sugiyono, 2005:1).

Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian serta peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data, artinya data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung) serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada BKBPP Kabupaten Bandung.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung). Adapun studi lapangan terdiri dari:

1) Observasi *(Observation)*

Mengadakan pengamatan langsung dilokasi atau terjun langsung dilapangan untuk mengetahui tentang Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung) serta dokumenter

yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Akan tetapi, dalam observasi ini penulis hanya bersifat non partisipan.

2) Wawancara, melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) (Suatu Studi pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung).

Dengan menggunakan cara penelitian di atas peneliti ingin mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang diselidiki dalam hubungannya dengan dunia kenyataan. Disamping juga untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* yang mendefinisikan pengertian *Purposive,* sebagai berikut:

> ”Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dapat diartikan bahwa informan yang kita pilih dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2005:54).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Efektivitas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) pada pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Adapun informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Aparatur BKBPP Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cangkuang, yang terdiri dari:
    1) Kepala Bidang Penyusunan Program sebab mengetahui program yang ada di BKBPP Kabupaten Bandung.
    2) Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian sebab mengetahui mengenai dari pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian
    3) Kepala Bagian Informasi dan Data Keluarga karena mengetahui tentang dibidang penelolaan informasi dan data Keluarga.
    4) Kepala Bagian Keluarga Berencana karena mengetahui di bidang pelayanan Keluarga Berencana meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian reproduksi remaja.
    5) Kepala UPT PPKB di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung karena mengetahui dibidang pelayanan, pengelolaan dan pengendalian program KB dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Adapun irforman dari Masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang pada pelaksanaan program KB terdiri dari:
    1) Masyarakat Desa Cangkuang sebagai masyarakat dari pelaksanaan program KB di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

2) Masyarakat Desa Ciluncat sebagai masyarakat dari pelaksanaan program KB di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
3) Masyarakat Desa Tanjung Sari sebagai masyarakat dari pelaksanaan program KB di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai efektivitas BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di Wilayah Kecamatan Cangkuang. Reduksi data sebagai proses pemilihan atau pengklasifikasi data-data yang didapat dari hasil wawancara bersama aparatur BKBPP Kabupaten Bandung, UPT PKB Kecamatan Cangkuang, dan masyarakat di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Obesrvasi di lapangan yakni di BKBPP dan di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung serta tinjauan pustaka. Semua data tersebut dipilih dan yang digunakan sesuai yang berkaitan dengan efektivitas BKBPP Kabupaten Bandung pada pelaksanaan program KB di Wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

3.2.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Jln. Jl. Raya Soreang KM 17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung (022-5891112). Adapun jadwal kegiatan penelitian yang telah dilakukan selama 7 bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2010 dan pelaksanaan penelitian selama ± 160 (seratus enam puluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 12 April 2012 sampai dengan 4 Agustus 2012, yaitu :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini mengenai Jadwal Kegiatan Penelitian.

Tabel 3.7
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2012						
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Tahapan Persiapan							
	Observasi Lokasi Penelitian	■						
	Pengajuan Judul		■					
	Penysunan Usulan Penelitian		■	■				
	Seminar Usulan Penelitian				■			
2	Tahapan Pelaksanaan							
	Pelaksanaan Penelitian	■	■	■	■	■	■	
	Wawancara		■	■	■	■	■	
	Studi Kepustakaan		■	■	■	■	■	
3	Tahap Akhir							
	Penyusunan Skripsi		■	■	■	■	■	
	Sidang							■